#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut :

 Bentuk penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati Biak dilaksanakan sesuai dengan adat setempat (Biak) berdasarkan musyawarah.

Tahap penyelesaian sengketa adalah:

- a) Para-para adat di Dewan Adat Biak;
- b) Kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan;
- c) Ganti rugi/kompensasi bagi anggota Keret Rumbiak yang dirugikan;
- 2. Kepastian hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret Rumbiak dapat terwujud karena penyelesaian dilaksanakan menurut hukum adat setempat (Biak) yang berdasarkan musyawarah mufakat, dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian yang berupa kesepakatan perdamaian, ganti rugi dan kompensasi mengandung kepastian hukum. Penyelesaian menurut hukum adat setempat tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat

Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

#### B. Saran

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat keret di Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Biak Numfor harus berkoordinasi bersama Dewan Adat Biak dalam rangka mendata dan menginventarisir tanah-tanah, baik tanah hak ulayat maupun perseorangan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya sengketa.

Penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melibatkan para pihak yang berkompeten dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung/Kelurahan serta Dewan Adat Biak bersama pihak yang bersengketa harus ada bukti pelaksanaan yang otentik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan, misalnya: undangan, absensi, berita acara, resume dan sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2006.,ImplementasiPrinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Sinar Grafika Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_, 2006., Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika Jakarta.
- A.Ridwan Halim ., Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Andi J. Hartanto, 2009., *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Bernhard Limbong, 2012., Konflik Pertanahan. Pustaka Margaretha Jakarta
- Budi Harsono, 2003., Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Universitas Trisakti Jakarta.
- Bushar Muhammad,1995., *Pokok Pokok Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita Jakarta.
- Dewi Wulansari , 2009., *Hukum Adat Indoensia Suatu Pengantar*. Relika Aditama Bandung.
- Djaren Saragih, 1982., Pengantar Hukum Adat Indonesia. Tarsito Bandung.
- Endang Sumiarni, dkk 2010.,Hukum Adat Biak. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Jayapura.
- Hadi Setia Tunggal, 2012.,Kompilasi Peraturan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Harvarindo.
- HR.Otje.Salman Soemadiningrat, 2011., Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. PT. Alumni Bandung.
- Gilissen dan Gorle, 2004.,Sejarah Hukum Suatu Pengantar. Refika Aditama Bandung.
- Karen Lebacqz, 1986., Teori-Teori Keadilan. Nusa Media Bandung.
- Mudjiono, 1997, Politik dan Hukum Agraria. Libertty Yogyakarta.

- Moh. H Koesnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju Bandung.
- Maria SW Sumardjono, 2008., Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kompas Jakarta.
- Muchsin. H, dkk 2010., *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Relika Aditama Bandung.
- Peter M Marzuki, 2005., Penelitian Hukum. Prenada Media Group Jakarta.
- Rusmadi Murad , 1991., Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Alumni Bandung.
- Supriyadi 2010., *Hukum Agraria*. Sinar Grafika Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, 2009., Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan. Laks Bang Justitia Surabaya.
- Sudikno Mertukusumo, 2011., *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_\_, 2007., *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Mandar Maju Bandung.
- \_\_\_\_\_\_\_, 2009.,Kebijakan Pertanahan Antara Reguilasi dan Implementasi. Kompas Jakarta
- Suhariningsih, 2009., *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Prestasi Pustaka Publiser Jakarta.
- Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). UMM Pres Malang.
- Soerjono Soekanto, 1988., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2011., *Politik Hukum, Diktat Mata Kuliah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soleman.B Taneko , 1981., *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Ter Haar Bzn. B, 1960., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnja Paramita Djakarta.

Urip Santoso, 2005., *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media Grup Jakarta.

#### B. HASIL PENELITIAN

- Rahayu Sri Dewi, SH 2003,Eksistensi Hak Ulayat (Tanah Tongkonan) Masyarakat Tana Toraja Di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, Universitas Diponegoro Semarang.
- Dwi Fatmawati, SH 2006, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan Mijen), Universitas Diponegoro Semarang.
- Adi Akbar 2009, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal, Universitas Di Ponegoro Semarang.

#### C. KAMUS

- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Terbaru), Penerbit : Gita Media Press
- Telly Sumbu, SH dkk, 2010, Kamus Umum, Politik dan Hukum, Penerbit : Jala Permata Aksara, Jakarta
- M. Marwan, dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Cetakan I)*, Penerbit: Gama Press.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Penerbit: CV. Aneka Ilmu Semarang

#### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.* 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukun Adat

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

#### WEBSITE

file://F:/penelitian%20Biak%20juli%2008%20Situs%Resmi%20Pemda%20Biak

%20Numfor%20sejarah.htm.

responsitori usu.ac.id/bitst hari senin tanggal 10 desember 2012



#### UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Program Pascasarjana

Nomor: 015 / Eks / V

Hal

: Permohonan Penelitian / Mencari Data

Kepada

Yth.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta memohonkan ijin bagi mahasiswa kami:

Nama

: Markus Metusalach Ronsumbre

No. Mahasiswa

: 115201581

Untuk mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua" sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 September 2012

Program Studi Magister Ilmu Hukum

PROCEA Bambang Riyanto, SH., M. Hum.

SCASARJANA

#### SURAT BUKTI PEMBAYARAN

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. 1. Nama : YUSUF MELIANUS MARYEN

Pekerjaan : BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Alamat : Jln.Majapahit Biak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. DORUS RUMBIAK

Pekerjaan : Pensiun PNS

Alamat : Iln. Ahmad Yani Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

II. 1 PIHAK PERTAMA sebagai pengguna tanah hak ulayat Marga Rumbiak (Lokasi rencana Kantor Bupati Biak Numfor) telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar) Rupiah kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA sebagai Pernilik Tanah menyatakan telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar) Rupiah dari PIHAK PERTAMA.

- 3. Dengan pembayaran tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB bila dikemudian hari ada tuntutan oleh pihak-pihak lain.
- 4. Bilamana dikemudian hari ada tuntutan dari pihak manapun, maka PIHAK KEDUA akari bertanggung jawab sepenuhnya.

III. Demikian Surat Bukti Pembayaran ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun dan disaksikan oleh

PLHAK KEDUA

Drs. DORUS RUMBIAK

SAKSI-SAKSI: 1. Sem Rumbiak

2. Gicieon Rumbiale

3. Aljonas yangga: 1

MARYEN

### **SURAT PERNYATAAN**

Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah ini Masing – Masing

1. N a m a : Marthen Rumbiak

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan: Tani/Nelayan Alamat: Desa Ambroben

2. Nama: Gr. Bernard Rumbiak

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan: PNS

Alamat: Desa Ambroben

3. N a m a : Fransina Kbarek

U m u r : 78 Tahun Pekerjaan : Tani

Alamat: Desa Ambroben

Dengan ini Kami Pemilik Hak Ulayat Sebenarnya, menyatakan Sikap Kami Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor bahwa, kami bersedia memberikan Lokasi Tersebut untuk Dibangun, dan dipakai dalam hal membangun Kantor Bupati atau apa saja yang maudibangun diatas Tanah tersebut. Dengan kesepakatan kami sebagai berikut:

- 1. Lokasi yang dimaksud, yang perna di jual belikan oleh Kel ( Alm Dorus Rumbiak cs). Dengan harga Rp.1.000.000.000 ( Satu Milyart) Rupiah agar, ganti Rugi Kepada kami, sesuai dengan itu juga.
- 2. Mohon agar Pemda Biak Numfor Memperhatikan Batas-batas hak ulayat dari Masyarakat adat untuk tidak melewati batas-batas hak yang ada, agar tidak menghambat Pembangunan kedepan.
- 3. Lokasi yang dimaksud, telah terlampir Peta Wilaya adat dari Marga/Keret Rumbiak khusus Kel (Alm. Salmon Rumbiak) atas Nama Marten Rumbiak.
- 4. Mohon, dengan harapan kedepan Kepala Daerah selaku Bpk dari Masyarakat Biak Numfor, Memperhartikan anak-anak Kami untuk dipekerjakan, dengan harapan, agar beberapa poin yang telah kami cantumkan dalam pernyataan kami, dapat dimaklumi untuk diperhatikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih Kepada Pemerintah Daerah yang sudah berupaya untuk kerja sama dengan kami kel (Alm. Salmon Rumbiak) atas Nama Marten Rumbiak cs.

Demikian Pernyataan ini Kami Buat dengan Sebenar-benarnya, dan dalam keadaan Sadar Tampa Paksaan dari Pihak Manapun, serta ditanda tangani bersama di

bersama di.

- 1. Marhten Rumbiak
- 2. Gr. Bernar Rumbiak
- 3. Fransina Kbarek

Biak, 23 Juni 2009 Mengetahui,

Kepala Kampung Ambroben

82 26.03.03.20

akobus konsumbre

Kepala Kampung Swapodibo

Frans Ronsumbro

MENGENARUT :

A ANJAREUW

YULIAYA MUMBIAK

# DAFTAR ADIR HASIL MUSYAWARA DAN MUFAKAT KELUARGA ALMARHUM SALMON RUMBIAK CS.

NO	N A M A	ON RUMBIAK CS.		
1	MARTEN RUMBIAK	1yorthy		
2	BERNARD RUMBIAK	2. Briere		
3	YANCE KBAREK	3		
4	MATHEUS KBAREK	1 A 1 A factor		
5	WILLEM KBAREK	5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
6	MOSES RUMBIAK	6. W bonne.		
7	ESAU RUMBIAK	7.		
8	JHON RUMBIAK	8. July Coan		
9	EMI KAFIAR	9 HATE		
10	LINCE RUMBIAK	10		
11	ABRAM RUMBIAK	11. Here's		
12	DANCE SIMOPYAREF	1212		
13	OBET SIMOPYAREF	13		
14	NIKSON RUMBIAK	14. Spine		
15	LASARUS RUMBIAK	15.		
16	RONAL RUMBIAK	16 Amysin S		
17	ANDI RUMBIAK	17. Atulial		
18	DANYEL RUMBIAK	18 the		
19	ENDRIK RUMBIAK	19		
20	MARKUS RUMBIAK	20/1/m		
21	FRANSINA KBAREK	21		
22	LABAN SIMOPYAREF	22		

23	SALOMINA SIMOPYAREF	23
24	TOM RUMAROPEN	24
25	KORINUS RUMBIAK	25
26	ANDI YORAM RUMBIAK	26. OTCOM 7
27	FRILAN RUMBIAK	27. Man 2
28	SUSANA ASARIBAW	28SA3
29	RENSI RUMERE	29 Thus
30	MARICE KBAREK	30 abonte
31	LUKAS RONSUMBRE	31. Luast
32	ROSITA AKOBIYAREK	32. Phosi areses
33	YULI RUMBIAK	33 Pul
34.	ISAK. RUMBIAK	34 money

BIAK,

### BADAN PERTANAHAN NASIONAL



# BUKU TANAH

HAK : MILIK. No. M. 85/AMBROBED

PROPINSI:	1 RIM JAYA
KABUPATEN/KOTAMADYA:	BIAR NUMFOR.
KECAMATAN :	BIAK KOTOS
D E S A/KELURAHAN : :	AMBROBED

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

BIAK NUMFOR

26.09.03.11.1.00085

a) HAK MILIK	f) NAMA PEMEGANG HAK
No. M. 85/AMBROBEN	
Desa AMBROBEU	* DIS DORUS RUMBIAK *
b) NAMA JALAN/PERSIL	
TALAN	
c) ASAL PERSIL	g) PEMBUKUAN
1. K <del>onver</del> si	BIAK Tgl 02 Nofember 1996
2. <del>Pemberian hak</del>	K∮pala Kantor Pertanahan
3. Pemisahan B. 57/mBRoBer	Kabupaten/Kotamadya  BIAK NUMFOK
4. <del>Penggabunga</del> n	WOUND TO THE PARTY OF THE PARTY
	NIP : 010 OST 172.
d) SURAT KEPUTUSAN	h) PENERBITAN SERTIPIKAT
PERMOMONIM PEMISAHAN	BIAK Tgl 05 NO PEMBER 1996
Uang pemasukan/biaya administrasi	Kebala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BiAK NUM FOK
Lamanya hak berlaku	
Berakhirnya hak Tgl.	DIS AND MOCH BAKRI NIP: 010 055 192.
e) SURAT-UKUR-GAMBAR SITUASI  Tgl. 01 - 11 - 1796	i) PENUNJUK WARKEPH XIDEROK: 629/1996 1799/1994
No. 816/1996	
Luas 10:557 M	

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

A LI LINE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR			
Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
7./08/1997 =		PT. BANK BUMI DAYA(PFRSERO)	
ASPREAN ARTH HAR	TGL.04-08-1997	CABANG BIAR	REPALA KANTOR PERTANAHAN
GUGAN PPAT	II. NO. 1026 / 1997		CABUPATEN BIAK NUMBER
MAT BIAR ROTA.	MNO.272 /1997	ALATA	MAK
03/100 BR/1997		0 - 1005 PERTA	
14 540 1997	J	25	
of Olch Partornau			DO JUDI YOUR BACK!
TORIES RUMO EUUR			NIP. 010 055 182.
	HT. 17. /1998		KEPALA KANTOR PERTANAHAN
asarkan Ahta Hak Igungan PPAT-	76 - 02 - 1998	DT BANK BUMI DAVA POTECTO)	
nat Samofa	136-,46	PT. BANK BUMI DAYACPERSERO)	THE THE POR
29 January 1998 at oleh Oschar	DI 307 NO. 2006/gs	LIGHT CABANG BINK S	Drs SUTIGNO
wek B.A.		Mark !	NFP. 010 05 188.
-ROYA -			REPALA RANTOR PERTANAMA
QDASARRAN PA HONAN PINDPINI NK NPANDIRI "(A(U) SURAT	0 N T61:30-03-200		RABUPATEN BIAK KUNSTAN
YA			
.10 C/3 1/3.41 \ 160 >s=			
4.29-03-20 CIANGGUEAN	7		
109 /1991 DI			Drs. ANDRIYATADO
HAPUS-	WARKAH: 13-2 Laco		NIP. 010 074965
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	*		
		<u> </u>	
			1 1 1 2 1 2
-/3			
	. J	\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
***************************************		1	1